



VISI

PEREKONOMIAN
INDONESIA
2030

Visi Perekonomian Indonesia 2030

Cetakan Pertama, Mei 2009

Badan Penerbit Ekonomi Pembangunan (BPEP) UNS
Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan, Solo, 57136.

Telp/Fax +62271-668607, 668609

Editor: Lukman Hakim, Dwi Prasetyani, Hery Sulistyono JNS

Desain Sampul: Lestude

Penata Letak: elha

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Perpusatakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Visi Perekonomian Indonesia 2030 /Lukman Hakim, Dwi Prasetyani, Hery Sulistyono JNS, Cetakan 1, Solo: BPEP, 2009.

vii + 200 hlm: 14 cm x 21 cm

ISBN 978-979-17320-0-0

Buku ini didedikasikan kepada
Guru dan Kolega Kami Yang Telah Purna Tugas

Prof. Dr. Suharno TS, SU

Drs. Darustam, BSc

Drs. Suhardi

Dra. Kustini

Dra. GAA. Susilowati, SU

Drs. Sri Mulyono, MSi

Semoga semangat perjuangannya dalam pendidikan dan pengembangan ilmu ekonomi dapat menginspirasi kami untuk terus melanjutkannya

Daftar Isi

Daftar Isi	v
Tentang Penulis	vi
Sumber Tulisan	viii
Pengantar Editor	ix
Kata Pengantar	x
1. Bangsa Maritim Sejahtera & Merata: Visi Indonesia 2030	1
Lukman Hakim	
Hery Sulistyو JNS	
2. Pentargetan Inflasi: Paradigma Baru Kebijakan Moneter	31
Lukman Hakim	
Siti Aisyah	
Hery Sulistyو JNS	
3. Reformulasi DAU Mendorong Pembangunan Daerah	49
Mulyanto	
Lukman Hakim	
4. Sektor Pertanian dan Pengentasan Kemiskinan	67
Akhmad Daerobi	
Hery Sulistyو JNS	
Tetuko Rawidyo Putro	

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Akses Sanitasi dan Kemiskinan Bhimo Rizky Samudro	105
6. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Sutomo Yunastiti Purwaningsih Yuliana Kartikasari	121
7. Model Kinerja dan Potensi Pajak Daerah Sumardi Dwi Prasetyani	149
Index	183

Tentang Penulis

AKHMAD DAEROBI adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Salatiga dan menyelesaikan S-1 di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi UNS. Gelar S-2 diperoleh dari Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran (Unpad). Saat ini tengah mengambil S-3 di Universitas Diponegoro.

BHIMO RIZKY SAMUDRO adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Yogyakarta dan mendapatkan gelar S-1 dan S-2 dari Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan (IESP) Fak. Ekonomi UGM. Ketika buku ini ditulis tengah melakukan persiapan studi lanjut di Curtin University of Technology, Australia.

DWI PRASETYANI adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Boyolali dan memperoleh gelar S-1 dari Jurusan Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi UNS. Menyelesaikan S-2 pada Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM. Saat ini, menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Non Reguler UNS.

HERY SULSITYO JNS adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Palu dan menyelesaikan S-1 dari Jurusan Ilmu Ekonomi (IE) Fak. Ekonomi UGM. Saat ini tengah menempuh S-2 di Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI).

LUKMAN HAKIM adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Ambarawa dan mendapatkan gelar S-1 dan S-2 dari Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan (IESP) Fak. Ekonomi UGM. Ketika buku ini diterbitkan tengah menyelesaikan S-3 di Universiti Utara Malaysia, Malaysia.

MULYANTO adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Klaten dan menyelesaikan S-1 pada Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fak. Ekonomi UNS. Gelar S-2 diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI). Saat ini tengah mengambil S-3 di Universitas Diponegoro.

SITI AISYAH TRI RAHAYU adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Cilacap dan mendapatkan gelar S-1 dan S-2 dari Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan (IESP) Fak. Ekonomi UGM. Saat ini tengah menyelesaikan S-3 di Universitas Gadjah Mada.

SUMARDI adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Klaten dan menyelesaikan S-1 dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fak. Ekonomi UNS. Saat ini menempuh S-2 di Program Pascasarjana UNS.

SUTOMO adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Boyolali dan mendapatkan gelar S-1 pada Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fak. Ekonomi UNS. Gelar S-2 diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI). Saat ini tengah menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fak. Ekonomi UNS.

TETUKO RAWIDYO PUTRO adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Yogyakarta dan menyelesaikan S-1 di Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fak. Ekonomi Universitas Airlangga (Unair). Gelar S-2 diperoleh dari Program Pascasarjana UGM. Saat ini tengah mengambil S-3 di Universitas Gadjah Mada.

YUNASTITI PURWANINGSIH adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS. Lahir di Surakarta dan mendapatkan gelar S-1 dan S-2 dari UGM. Saat ini tengah menyelesaikan S-3 di Universitas Gadjah Mada.

YULIANA KARTIKASARI adalah lulusan Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UNS.

Sumber Tulisan

1. Bangsa Maritim Sejahtera dan Merata: Visi Indonesia 2030, merupakan makalah yang tulis dalam rangka Lomba Skenario Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, 2006.
2. Pentargetan Inflasi: Paradigma Baru Kebijakan Moneter merupakan makalah dalam rangka Lomba Simulasi Inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, 2006, mendapatkan penghargaan peringkat ke-empat.
3. Reformulasi DAU Mendorong Pembangunan Daerah merupakan makalah dalam rangka Lomba Reformulasi DAU yang diselenggarakan oleh LPEM UI dan Depdagri, 2005, yang mendapatkan penghargaan sebagai pemenang pertama.
4. Sektor Pertanian dan Pengentasan Kemiskinan merupakan makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional IRSA 2006, di Malang
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Akses Sanitasi dan kemiskinan, makalah ini pernah dipresentasikan pada Konferensi Internasional IRSA 2006, di Malang.
6. Perencanaan Tenaga Daerah merupakan kertas kerja yang disampaikan pada forum diskusi Dewan Pengupahan Kota Surakarta pada tahun 2007.
7. Model Kinerja dan Potensi Pajak Daerah, merupakan kertas kerja yang telah disampaikan di beberapa Kab/Kota antara lain di Kota Dumai, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Jepara, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa.

Pengantar Editor

Menumbuhkan tradisi intelektual pada sebuah perguruan tinggi bukan perkara mudah. Tradisi intelektual biasanya diwujudkan dalam tradisi riset yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau buku. Sudah banyak jurnal yang dimiliki perguruan tinggi baik yang telah maupun belum terakreditasi. Namun yang masih relatif terabaikan adalah buku tematik yang menyoal masalah tertentu. Penerbitan buku ini dalam rangka mengisi kekosongan itu.

Sejak tahun 2005, banyak dosen di lingkungan Jurusan Ekonomi Pembangunan menulis paper dalam rangka lomba ataupun konferensi nasional maupun internasional. Beberapa dari paper itu mendapatkan penghargaan. Namun sebagian besar kalangan civitas akademika di lingkungan internal maupun eksternal tidak pernah mengetahuinya. Agar makalah-makalah tersebut dapat juga disimak oleh civitas akademika, maka kami menerbitkannya dalam bentuk buku ini.

Buku ini berisi 7 (tujuh) artikel terpilih yang mencakup topik perencanaan, moneter, fiskal daerah, pertanian, kemiskinan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Tulisan-tulisan ini diharapkan dapat memberikan visi bagi pembangunan Indonesia, sesuai dengan judul buku ini "Visi Perekonomian Indonesia 2030".

Terakhir, buku ini didedikasikan kepada guru dan sekaligus kolega pada Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memasuki masa purna tugas yakni Prof. Dr. Suharno TS, SU, Drs. Darustam, BSc, Drs. Suhardi, Dra. Kustini, Dra, GAA Susilowati, SU, Drs. Sri Mulyono, MSi. Semoga semangat perjuangannya dalam bidang ekonomi dapat menginspirasi kami untuk terus melanjutkannya.

Solo, Mei 2009

LH, DP, HS

Kata Pengantar Kajur

Prakarsa untuk menerbitkan beberapa karya ilmiah rekan-rekan dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan (JEP) FE UNS patut didukung sepenuhnya. Banyak karya-karya dosen baik dalam rangka riset maupun presentasi ilmiah pada skala lokal, regional, maupun internasional hanya tersimpan di dalam arsip. Dan tidak ada upaya untuk mempublikasikannya. Hal ini patut disayangkan, karena seharusnya karya-karya ilmiah itu dapat diseminasikan kepada publik sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menjawab masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Oleh sebab itu, penerbitan kumpulan artikel ini merupakan salah satu cara mensosialisasikan ide dan wacana kepada masyarakat luas.

Selain itu, penerbitan buku ini juga dapat menjadi barometer tradisi intelektual di kalangan para dosen. Ini sekaligus akan memacu penumbuhkembangan tradisi riset dan menulis pada civitas akademika yang merupakan bagian tak terpisahkan sebagai insan akademis. Kami bertekad setiap tahun Jurusan Ekonomi Pembangunan dapat memfasilitasi penerbitan karya-karya ilmiah dosen dalam bentuk buku seperti ini.

Akhirnya pada kesempatan ini, kami selaku pimpinan Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UNS mengucapkan selamat atas penerbitan buku ini dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kelancarannya.

Solo, Mei 2009

Ketua Jurusan

Drs. Kresno Sarosa Pribadi, MSi

Kata Pengantar Dekan

Selaku pimpinan Fakultas Ekonomi UNS, kami menyambut baik penerbitan buku "Visi Perekonomian Indonesia 2030". Ini merupakan langkah tepat untuk memulai menerbitkan karya-karya ilmiah civitas akademika dalam bentuk buku. Dengan ini semoga buah pemikiran dari kalangan kampus dapat tersosialisasi pada seluruh pihak pemangku kepentingan (stakeholders).

Demikian halnya, dengan judul buku "Visi Perekonomian Indonesia 2030" juga mempunyai makna yang dalam. Mengingat sejak lahirnya Undang-undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pemerintah pada tingkat nasional maupun daerah harus mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PRJP) 20 tahunan. Belum banyak akademisi maupun pakar yang membahas topik visi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang secara komprehensif. Oleh sebab itu, buku ini diharapkan dapat mengisi kekosongan itu. Dalam buku ini visi perekonomian masa depan ditinjau dari berbagai aspek diantaranya adalah scenario planning, moneter, pembangunan daerah, lingkungan dan ketenagakerjaan.

Terakhir, selaku pimpinan Fakultas Ekonomi UNS, kami berharap buku ini dapat menginspirasi kolega-kolega yang lain agar selalu menerbitkan hasil-hasil riset mereka, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Solo, Mei 2009

Dekan

Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com

3

REFORMULASI DAU MENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH

MULYANTO
LUKMAN HAKIM

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya UU No.25/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; ada nuansa baru di dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah. Dengan paradigma baru tersebut, struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengalami perubahan dengan masuknya pos Dana Perimbangan yang terdiri atas: (i) Pos Bagi Hasil Daerah; (ii) Pos DAU (Dana Alokasi Umum); dan (iii) Pos DAK (Dana Alokasi Khusus). Dengan paradigma tersebut, salah satu konsekuensi logis dari pemberlakuan UU No.25/1999 adalah dihapuskannya konsep/pos SDO (Subsidi Daerah Otonom) atau DRD (Dana Rutin Daerah) dan DI (Dana Inpres) atau DPD (Dana Pembangunan Daerah) yang dilaksanakan dengan mekanisme Inpres (Instruksi Presiden); digantikan dengan 'satu' paket transfer yang dikenal dengan istilah DAU (Dana Alokasi Umum), yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Daerah.

Dari penjelasan di atas, DAU (Dana Alokasi Umum) secara umum dapat dikatakan sebagai block grant transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) yang nilainya ditentukan oleh besarnya bobot daerah yang dihasilkan dari serangkaian perhitungan atas dasar sejumlah variabel atau data dasar yang bersifat nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.25/1999. Tujuan penetapan DAU adalah untuk mengurangi ketimpangan horizontal dan juga untuk menyediakan penyeimbang fiskal (equalizing factor)

antar daerah; dengan memperhatikan potensi daerah, luas wilayah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat; sehingga perbedaan antar Daerah yang maju dengan Daerah yang belum belum berkembang dapat diperkecil atau diminimalisir.

Besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari PDN (Penerimaan Dalam Negeri) yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada Daerah. Besarnya DAU untuk Propinsi sebesar 10% (sepuluh persen), sedang untuk Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen). Selama era otonomi, tepatnya sejak 1 Januari 2001; sudah 4 (empat) kali ditepkan Keppres (Keputusan Presiden), yang terkait dengan masalah DAU, yaitu: (i) Keppres Nomor 181 Tahun 2000 tentang DAU Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001; (ii) Keppres Nomor 131 Tahun 2001 tentang DAU Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002; (iii) Keppres Nomor 1 Tahun 2003 tentang DAU Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003; serta (iv) Keppres Nomor 109 Tahun 2003 tentang DAU Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004. Selama 4 (empat) tahun pelaksanaan DAU, sudah terjadi perubahan PP (Peraturan Pemerintah) yang menjadi dasar bagi penyusunan rumusan/formula DAU, yaitu dari: PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, dan kemudian diubah menjadi PP Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Dua PP (Peraturan Pemerintah) inilah yang menjadi dasar bagi penyusunan dan perbaikan rumusan/formulasi DAU sekarang ini dan mungkin di tahun-tahun mendatang; selama belum terjadi amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1999.

Berdasar pada Keppres di atas, jumlah DAU secara keseluruhan yang dialokasikan ke daerah selama tahun 2001-2004 masing-masing adalah: (i) sebesar Rp 60.516,70 miliar untuk tahun 2001, dengan rincian ke Provinsi sebesar Rp 6.051,67 miliar dan ke

Kabupaten/Kota sebesar Rp 54.465,00 miliar; (ii) sebesar Rp 66.364,10 miliar untuk tahun 2002, dengan rincian ke Provinsi sebesar Rp 6.634,4 miliar dan ke Kabupaten/Kota sebesar Rp 59.727,70 miliar; (iii) sebesar Rp 76.978,00 miliar untuk tahun 2003 atau meningkat sebesar 11,4% dibanding DAU tahun 2002, dengan rincian ke Provinsi sebesar Rp 7.697,80 miliar dan ke Kabupaten/Kota sebesar Rp 69.280,20 miliar; serta (iv) sebesar Rp 82.130,94 miliar untuk tahun 2004, dengan rincian ke Provinsi sebesar Rp 8.213,1 miliar dan ke Kabupaten/Kota sebesar Rp 73.917,85 miliar. Besarnya DAU tersebut, tidak sepenuhnya didasarkan pada suatu faktor formula/rumusan yang ditetapkan tetapi masih ada faktor lain berupa faktor penyeimbang dan faktor lumpsum. Hal inilah yang menjadi pemikiran ke depan bahwa hasil perhitungan DAU sebaiknya yang benar-benar dihasilkan dari suatu faktor formula tertentu yang disepakati oleh banyak pihak. Termasuk kemungkinan tidak adanya DAU bagi suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota jika ternyata ditemukan bahwa kebutuhan fiskal (*fiscal need*) memang nyata-nyata lebih kecil dibanding dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Tulisan ini akan mengkaji perjalanan perumusan DAU selama ini, yang kemudian dilanjutkan dengan usulan perubahan terhadap rumusan, serta diakhiri dengan penutup.

TINJAUAN PERKEMBANGAN RUMUSAN DAU

Sebagaimana yang banyak disebutkan bahwa tujuan pengalokasikan DAU, selain dalam kerangka otonomi pemerintahan di tingkat Daerah, juga untuk pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik di antara pemerintahan Daerah di Indonesia. Di samping itu, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar Daerah sebagai akibat dari pembagian Dana Bagi Hasil Daerah, khususnya dari SDA (*Sumber Daya Alam*) yang hanya menguntungkan pada Daerah-Daerah tertentu. Oleh karena itu, formula/rumusan DAU disusun dengan lebih mempertimbangkan pada sisi kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) dan kebutuhan Daerah (*fiscal need*). Dengan kata lain, bahwa kebutuhan DAU

suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya kesenjangan fiskal (fiscal gap) suatu Daerah; yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dengan potensi Daerah (fiscal capacity). Pada bagian berikut akan dipaparkan sekilas perkembangan rumusan DAU dari tahun 2001-2003. Tidak dibahasnya rumusan DAU tahun 2004, semata-mata dikarenakan belum didapatkannya informasi mengenai rumusan DAU untuk tahun tersebut secara lengkap dan akurat.

DAU Tahun 2001

DAU tahun 2001, didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: (i) dipenuhinya norma hukum dalam UU No.25/1999; (ii) adanya kejelasan hubungan antar kebutuhan Daerah dan potensi Daerah; (iii) besarnya DAU paling tidak sama dengan besarnya SDO/DRD (Dana Rutin Daerah) dan DI/DPD (Dana Pembangunan Daerah); (iv) adanya unsur kemudahan di dalam memahami rumus penentu besaran DAU; serta (v) rumus didasarkan atas variabel-variabel datanya tersedia dan akurat. Secara umum besaran DAU pada tahun 2001, didapatkan dari penjumlahan atas 3 (tiga) faktor, yaitu:

- a. FP (Faktor Penyeimbang), yaitu suatu mekanisme untuk mencegah penurunan kapasitas pemerintah Daerah dalam membiayai kewajiban-kewajiban yang tidak diduga sebelumnya, termasuk untuk mengantisipasi permasalahan pendanaan yang muncul akibat terjadinya transfer pegawai dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Transfer pegawai tersebut dilakukan, mengingat terjadinya likuidasi dari beberapa fungsi dekonsentrasi Pemerintah Pusat (kanwil, kandep): seperti: departemen transmigrasi, pariwisata dan budaya, koperasi, sosial, penerangan, dan pekerjaan umum.
- b. FF (Faktor Formula), yaitu faktor rumusan DAU yang berisi variabel-variabel yang sesuai dengan amanat UU No.25/1999, yang kemudian secara lebih jelas dituangkan dalam PP No.104/

2000 tentang Dana Perimbangan. Variabel-variabel ini, secara umum meliputi:

- Potensi Penerimaan, yang terdiri dari: PDRB Primer (PDRB sektor SDA: Sumber Daya Alam); PDRB Non-Primer (PDRB sektor industri dan jasa lainnya); dan Angkatan Kerja (Penduduk Usia Produktif).
 - Kebutuhan Daerah, yang terdiri dari: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Harga Bangunan, Jumlah Penduduk Miskin.
- c. FL (Faktor Lumpsum), yaitu suatu mekanisme untuk membagi habis total DAU yang sudah dianggarkan dalam APBN ke Daerah-Daerah.

Di samping alokasi DAU yang sudah didistribusikan kepada Daerah-Daerah dengan skema pencairan 1/12 untuk setiap bulannya, juga terdapat dana tambahan yang diberikan kepada beberapa Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi tingginya biaya transfer pegawai dari Pusat ke Daerah, lambatnya peralihan kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, serta terjadinya kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dana tambahan tersebut diberikan dalam bentuk Dana Kontijensi Tahap I, Dana Kontijensi Tahap II, dan Dana Talangan.

DAU Tahun 2002

Dengan ditemukannya beberapa kelemahan yang terdapat dalam formulasi DAU tahun 2001, Pemerintah telah meninjau kembali formulasi DAU; termasuk mereformulasikan kembali untuk perhitungan DAU tahun 2002. Reformulasi DAU tahun 2002, didasarkan atas beberapa hal, yaitu: (i) Dalam Keppres Nomor 181 Tahun 2000 secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan DAU tahun 2001 hanya berlaku untuk satu tahun yang bersangkutan dan tidak terkait dengan penghitungan DAU tahun 2002 dan tahun-tahun selanjutnya; (ii) Rapat DPOD tanggal 18 Desember 2000, yang menyatakan bahwa formulasi DAU tahun 2001 masih banyak ditemukan kelemahannya, sehingga perlu dilakukan perbaikan-

perbaikan guna menyempurnakan formulasi DAU tahun 2002 dan tahun-tahun berikutnya; (iii) Kesepakatan dalam Tim Kecil Dana Perimbangan Panitia Anggaran DPR RI tanggal 28 Maret 2001 yang menyatakan bahwa perlu dilakukan penyempurnaan formula dan distribusi DAU tahun 2002 dengan tujuan untuk mengurangi celah fiskal (*fiscal gap*) antar Daerah serta dapat lebih mencerminkan asa keadilan dan pemerataan.

Berdasar pada permasalahan di atas, beberapa ketentuan yang menjadi dasar bagi penyusunan formulasi DAU tahun 2002, yaitu: (i) Tetap mengacu pada kaidah-kaidah dasar dalam UU No.25/1999, dimana DAU akan dialokasikan dengan menggunakan bobot Daerah yang dihitung dengan formula yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan potensi Daerah yang diwujudkan atas beberapa indikator/variabel yang dipergunakan dalam memperkirakan besarnya kebutuhan dan potensi penerimaan Daerah; (ii) Formula DAU tetap menggunakan celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu kebutuhan pembiayaan (*fiscal need*) dibandingkan dengan potensi penerimaan (*fiscal capacity*); (iii) Pendekatan *Fiscal Gap* memungkinkan adanya Daerah yang relatif sudah dianggap mampu dari segi kapasitas keuangan, dan seharusnya tidak lagi memerlukan alokasi DAU; (iv) Mengacu pada variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam UU No.25/1999, tetapi sekaligus membuka kemungkinan penambahan beberapa variabel baru yang merupakan penyempurnaan dari variabel formula DAU dalam PP Nomor 104 Tahun 2000, tanpa menyimpang dari UU itu sendiri; (v) Formula DAU harus sederhana dalam artian dapat dijelaskan dan mudah dipahami serta dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan; (vi) Akurasi data baik untuk variabel *fiscal need* maupun *fiscal capacity* yang akan digunakan untuk penghitungan DAU harus menjadi perhatian utama; (vii) Salah satu misi atau tujuan keberadaan DAU adalah sebagai transfer yang menyeimbangkan kemampuan keuangan antar Daerah (*equalization grant*), yang secara teknis akan menghasilkan suatu indeks koefisien variasi penerimaan per kapita yang sekecil mungkin.

DAU Tahun 2003

Dalam perhitungan DAU tahun 2003 menitik beratkan pada hasil rapat Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 10 Juli 2002, yang telah menetapkan bahwa salah satu kebijakan dalam formulasi dan perhitungan DAU 2003 berupa penyempurnaan formula dan perhitungan DAU yang dilakukan dengan: (i) meningkatkan akurasi data; (ii) secara berangsur-angsur mengurangi peran AM (Alokasi Minimum) untuk memperbesar dana yang dialokasikan untuk mengoreksi kesenjangan antar Daerah; (iii) diupayakan untuk tetap menjaga agar tidak ada Daerah yang akan menerima DAU tahun 2003 lebih kecil atau minimal sama dengan DAU tahun 2002 ditambah Dana Penyeimbang.

Secara ringkas, persamaan dan perbedaan antara formulasi besaran DAU tahun 2001, 2002, dan 2003; selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

USULAN PERUBAHAN RUMUSAN DAU

Usulan terhadap rumusan DAU yang akan dibahas di sini hanya dikaitkan dengan faktor formula DAU (baca KF: Kesenjangan Fiskal), yang ke depan sebaiknya menjadi dasar bagi penentuan dan perhitungan besaran DAU, dengan seminimal mungkin memasukkan faktor-faktor lain selain faktor formula, seperti faktor penyeimbang dan faktor lump sum. Usulan perubahan rumusan DAU dalam tulisan ini, didasarkan pada penjabaran lebih lanjut atas formulasi DAU tahun 2003 yang dipandang sudah lebih baik dibanding dengan model-model formula DAU untuk tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, juga tetap mempertimbangkan PP Nomor 84 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, yang merinci Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah dan Potensi Ekonomi Daerah untuk menghasilkan besaran DAU, dimana Kebutuhan DAU suatu Daerah yang sering diistilahkan dengan KF (Kesenjangan Fiskal) adalah Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah (fiscal need) dikurangi dengan Potensi Ekonomi Daerah (fiscal capacity). Selanjutnya untuk menghitung

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan Besaran DAU, Tahun 2001 - 2003

Keterangan/Uraian	DAU 2001 (2)	DAU 2002 (3)	DAU 2003 (4)
- Komponen DAU	FP + KF	AM + KF	AM + KF
- Formulasi KF	DRD + DPD 2000	PP No.84 Thn 2001	PP No.84 Thn 2001
- Alokasi Minimum	SDO + Dana Inpres	Lumpsum + α .Gaji	Lumpsum + α .Gaji
- Komponen AM dan KF	80% FP 20% KF	Provinsi - 20% Lumpsum - 30% α .Gaji - 50% KF Kab/Kota - 10% Lumpsum - 50% α .Gaji - 40% KF	Provinsi - 10% Lumpsum - 30% α .Gaji - 60% KF Kab/Kota - 5% Lumpsum - 45% α .Gaji - 50% KF
- Koefisien Variasi Indeks Williamson	0,49 0,63	0,45 0,62	0,44 0,61

Catatan: FP : Faktor Penyeimbang
 KF : Kesenjangan Fiskal (dari formula DAU)

AM : Alokasi Minimum

DRD : Dana Rutin Daerah

DPD : Dana Pembangunan Daerah

Sumber: Ditjen PKPD Depkeu RI. (2004). Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, 2001-2003, hal. 90.

Bobot DAU Daerah, dapat dihasilkan dengan membandingkan Kebutuhan DAU suatu Daerah (KF: Kesenjangan Fiskal) dengan Total Kebutuhan DAU, baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Akhirnya besarnya DAU Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat dihasilkan dengan mengalikan Bobot DAU dengan besarnya nilai DAU yang akan dialokasikan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersumber dari PDN (Penerimaan Dalam Negeri) netto dalam APBN.

Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah yang sering diistilahkan dengan Kebutuhan Fiskal (fiscal need) atau disingkat dengan KbF; dalam Formulasi DAU tahun 2003 dirumuskan sebagai berikut:

$$KbF = PDR \times (0,4.IJP + 0,1.ILW + 0,0.IKP + 0,1.IKR + 0,4.IKK) \dots\dots\dots(1)$$

Dimana

- KbF : Kebutuhan Fiskal
- PDR : Pengeluaran Daerah Rata-Rata
- IJP : Indeks Jumlah Penduduk
- ILW : Indeks Luas Wilayah
- IKP : Indeks Kepadatan Penduduk
- IKR : Indeks Kemiskinan Relatif
- IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

Sementara itu, Potensi Ekonomi Daerah yang sering diistilahkan dengan Kapasitas Fiskal (fiscal capacity) atau disingkat dengan KpF; dalam Formulasi DAU tahun 2003 dirumuskan sebagai berikut:

$$KpF = PADU + (PBB + BPHTB + PPh + 0,75.SDA) \dots\dots\dots (2)$$

Dimana

- KpF : Kapasitas Fiskal
- PADU : Pendapatan Asli Daerah (diestimasi dari PDRB sektor jasa)
- PBB : Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
- BPHTB : Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- PPh : Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- SDA : Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam

Terakhir, Kesenjangan Fiskal (KF) adalah selisih dari Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah (KbF: Kebutuhan Fiskal) dengan Potensi Ekonomi Daerah (KpF: Kapasitas Fiskal), atau secara matematis dirumuskan:

$$KF = KbF - KpF \dots\dots\dots(3)$$

Dimana

KF : Kesenjangan Fiskal

KbF : Kebutuhan Fiskal

KpF : Kapasitas Fiskal

Usulan Perubahan Formula

Usulan perubahan rumusan DAU dalam tulisan ini, hanya dititikberatkan pada upaya untuk memodifikasi bagian Kebutuhan Fiskal (KbF); khususnya pada variabel IJP (Indeks Jumlah Penduduk) dan IKR (Indeks Kemiskinan Relatif). IJP dan IKR akan dimodifikasi dengan memasukkan variabel pembentuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (Human Development Index), dimana data untuk tahun 1999 telah tersedia, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam publikasi yang diterbitkan atas kerjasama antara BPS, BAPPENAS, dan UNDP pada tahun 2001 dengan judul: "Indonesia Human Development Report : Towards a New Consensus, Democracy and Human Development in Indonesia". Publikasi ini juga sudah diperbaharui melalui publikasi yang berjudul: "Human Development Report 2004: The Economics of Democracy, Financing Human Development in Indonesia". Artinya, jika data ini kelak bisa dimasukkan ke dalam rumusan DAU di masa-masa mendatang, maka kebutuhan DAU juga sangat terkait dengan upaya peningkatan IPM (Indeks Pengembangan Manusia) yang di dalamnya menyangkut aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Data tahun 1999 yang berupa Lamanya Tahun Sekolah (ILS: Indeks Lama Sekolah), Angka Harapan Hidup (IHH: Indeks Harapan Hidup), dan Angka Melek Huruf (IMH: Indeks Melek Huruf); akan dimasukkan dalam rumusan pada bagian Kebutuhan Wilayah Otonomi

(KbF: Kebutuhan Fiskal), yang secara lengkap dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KbF} = \text{PDR} \times ([0,4. (0,6.\text{IJP} + 0,4.\text{ILS})] + [0,1. (0,3.\text{IKR} + 0,4.\text{IMH} + 0,3.\text{IHH})] + 0,1.\text{ILW} + 0,4.\text{IHB}) \quad (4)$$

Dimana

KbF : Kebutuhan Fiskal

PDR : Pengeluaran Daerah Rata-Rata

- Besaran ini sesuai dengan data mentah sebesar Rp 425,71 miliar.

IJP : Indeks Jumlah Penduduk

- Merupakan rasio antara Penduduk suatu Daerah dengan Rata-rata Penduduk secara Nasional (sama dengan konsep sebelumnya).
- Bobot 0,6 dihasilkan dari pertimbangan koefisien variasi.

ILS : Indeks Lama Sekolah

- Merupakan rasio antara Rata-rata Tahun Lama Sekolah secara Nasional dengan Lama Tahun Sekolah di suatu Daerah
- Bobot 0,4 dihasilkan dari pertimbangan koefisien variasi.

IKR : Indeks Kemiskinan Relatif

- Konsep sama dengan model-model sebelumnya, yaitu dicari secara bertahap dari perhitungan HCI (Head Count Index), IG (Income Gap), dan terakhir baru menghitung IKR.
- Bobot 0,3 dihasilkan dari pertimbangan koefisien variasi.

IMH : Indeks Melek Huruf

- Merupakan rasio antara Rata-rata Persentase Melek Huruf secara Nasional dengan Persentase Melek Huruf di suatu Daerah.
- Bobot 0,4 dihasilkan dari pertimbangan koefisien variasi.

- IHH : Indeks Harapan Hidup
- Merupakan rasio antara Rata-rata Tahun Harapan Hidup secara Nasional dengan Tahun Harapan Hidup di suatu Daerah.
 - Bobot 0,3 dihasilkan dari pertimbangan koefisien variasi.
- ILW : Indeks Luas Wilayah
- Merupakan rasio antara Luas Wilayah dengan Rata-rata Luas Wilayah secara Nasional (sama dengan konsep sebelumnya).
- IHB : Indeks Harga Bangunan
- Merupakan rasio antara Indeks Harga Bangunan dengan Rata-rata Indeks Harga Bangunan secara Nasional (sama dengan konsep sebelumnya).

Angka Cetak Tebal, bobot secara makro yang besarnya masing-masing 0,4; 0,1; 0,1; dan 0,4 sama dengan model-model yang sebelumnya diterapkan, khususnya untuk rumusan DAU tahun 2003.

Sementara itu, Potensi Ekonomi Daerah yang sering diistilahkan dengan Kapasitas Fiskal (fiscal capacity) atau disingkat dengan KpF; dalam usulan formulasi DAU saat ini, tidak mengalami perubahan secara berarti; atau selengkapnya dirumuskan sebagai berikut:

$$KpF = PAD\dot{U} + (PBB + BPHTB + PPh + 0,75.SDA).....(5)$$

Dimana

KpF : Kapasitas Fiskal

PAD \dot{U} : Pendapatan Asli Daerah (diestimasi dari PDRB sektor jasa)

Hasil regresi didapatkan

$$PAD\dot{U} = -34,31360 + 0,013290 PDRB\text{Jasa}$$

Karena konstantanya negatif dan dianggap tidak signifikan (hasil t-statistic sebesar -1,57 (probabilitas sebesar 12,75%); maka untuk estimasi hanya digunakan besarnya koefisien regresinya saja, yaitu sebesar 0,013290.

- PBB : Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
 BPHTB : Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 PPh : Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
 SDA : Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam

Proses selanjutnya sama, yaitu menentukan besarnya Kesenjangan Fiskal (KF), yang merupakan selisih dari Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah (KbF: Kebutuhan Fiskal) dengan Potensi Ekonomi Daerah (KpF: Kapasitas Fiskal), atau secara matematis dirumuskan:

$$KF = KbF - KpF \dots\dots\dots(6)$$

HASIL SIMULASI

Setelah dilakukan serangkaian simulasi, yang dalam tulisan ini baru diujicobakan pada tingkat propinsi, dihasilkan perbandingan perolehan DAU selama tahun 2001-2003, seperti terlihat pada tabel 2. Dari tabel 2 dapat dilihat adanya 5 (lima) provinsi yang tidak mendapatkan alokasi dana dari DAU, yang dikarenakan kebutuhan fiskal daerahnya (fiscal need) lebih rendah dibanding dengan kapasitas fiskalnya (fiscal capacity), sehingga menghasilkan kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang negatif. Kelima daerah/provinsi tersebut adalah: (1) Provinsi Riau; (2) Provinsi DKI Jakarta; (3) Provinsi Jawa Barat; (4) Provinsi Jawa Timur; serta (5) Provinsi Kalimantan Timur.

Di samping itu, dapat juga kita lihat bahwa besaran DAU untuk tahun 2003 hampir mendekati dengan besarnya alokasi anggaran DAU menurut Keppres, dengan koefisien variasi yang hampir sama yaitu 0,52 (hasil Keppres) dibanding dengan 0,62 (hasil simulasi). Perbedaan menyolok justru terletak pada daerah-daerah atau propinsi yang HDI/IPM-nya juga mengalami perbedaan secara meyakinkan bila dilihat dari besaran variabel-variabel pembentuk HDI/IPM, khususnya variabel: Rata-rata Lama Sekolah (ILS: Indeks Lama Sekolah); Angka Harapan Hidup (IHH: Indeks Harapan Hidup), dan Angka Melek Huruf (IMH: Indeks Melek Huruf). Sementara

Tabel 2. Hasil Perbandingan Besaran DAU antara Keppres dan Simulasi, Tahun 2001-2003

No.	Provinsi	DAU Tahun 2001		DAU Tahun 2002		DAU Tahun 2003	
		Keppres	Simulasi	Keppres	Simulasi	Keppres	Simulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	DI Aceh	165.80	74.36	150.56	88.27	76.12	98.32
02.	Sumut	264.42	139.99	260.61	166.18	301.75	185.09
03.	Sumbar	140.73	156.73	193.52	186.07	227.63	207.23
04.	Riau	251.94	-	110.71	-	74.21	-
05.	Jambi	109.29	246.25	181.92	292.33	209.25	325.59
06.	Sumsel	153.17	134.04	211.53	159.13	231.93	177.23
07.	Bengkulu	82.74	237.14	162.56	281.52	208.84	313.55
08.	Lampung	180.30	195.59	211.11	232.19	252.78	258.61
09.	DKI Jakarta	587.17	-	535.70	-	734.89	-
10.	Jabar	521.23	-	393.88	-	429.57	-
11.	Jateng	647.21	139.09	560.63	165.12	509.87	183.90
12.	DI Yogya	110.36	183.00	214.48	217.25	201.96	241.97
13.	Jatim	449.57	-	453.21	-	414.32	-
14.	Kalbar	194.38	301.34	228.28	357.73	272.91	398.43
15.	Kalteng	153.31	287.83	204.84	341.69	253.60	380.57
16.	Kalsel	122.52	196.62	161.80	233.41	201.09	259.97
17.	Kaltim	257.11	-	96.96	-	76.41	-
18.	Sulut	75.58	246.49	233.47	292.62	206.65	325.91
19.	Sulteng	126.45	277.30	190.52	329.19	240.70	366.64
20.	Sulsel	232.73	255.71	257.41	303.57	299.05	338.11
21.	Sultra	101.38	273.21	179.37	324.33	226.43	361.24
22.	Bali	91.17	162.38	168.17	192.77	184.87	214.70
23.	NTB	122.61	277.09	193.80	328.94	223.95	366.37
24.	NTT	150.93	324.14	244.03	384.79	283.04	428.57
25.	Maluku	101.29	274.39	191.71	325.74	248.37	362.80
26.	Irija / Papua	101.29	523.54	345.53	621.52	395.16	692.23
27.	Maluku Utara	74.11	262.25	144.28	311.33	200.96	346.75
28.	Banten	142.15	134.96	155.59	160.21	171.86	178.44
29.	Bangka Beitung	65.64	269.18	146.22	319.56	162.49	355.91
30.	Gorontalo	45.35	249.31	129.04	295.96	177.13	329.64
	Sum	5,821.93	5,821.93	6,911.44	6,911.42	7,697.79	7,697.77
	Average / Mean	194.06	194.06	230.38	230.38	256.59	256.59
	Minimum	45.35	0.00	96.96	0.00	74.21	0.00
	Maximum	647.21	523.54	560.63	621.52	734.89	692.23
	Coef. of Variation	0.80	0.62	0.50	0.62	0.52	0.62

Sumber : Keppres tentang DAU tahun 2001-2003; dan Hasil Simulasi Model DAU.

Tabel 3. Hasil Perbandingan 5 (lima) Provinsi Penerima DAU Terbesar dan Terkecil

No.	Menurut Keppres			Hasil Simulasi
	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kategori 5 (lima) Povinsi Peroleh DAU Terbesar				
01.	Jawa Tengah	Jawa Tengah	DKI Jakarta	Irja/Papua
02.	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jawa Tengah	Nusa Teng. Timur
03.	Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Barat	Kalimantan Barat
04.	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Timur	Kalimantan Tengah
05.	Sumatera Utara	Irja/Papua	Irja/Papua	Sulawesi Tengah
Kategori 5 (lima) Povinsi Peroleh DAU Terkecil				
26.	Bengkulu	Bangka Belitung	Banten	Sumatera Utara
27.	Sulawesi Utara	Maluku Utara	Bangka Belitung	Jawa Tengah
28.	Maluku Utara	Gorontalo	Kalimantan Timur	Banten
29.	Bangka Belitung	Riau	DI Aceh	Sumatera Selatan
30.	Gorontalo	Kalimantan Timur	Riau	DI Aceh
Indeks Williamson				0.9087

Sumber: Diolah dari tabel 2

itu, bila dilihat dari 5 (lima) besar Provinsi yang menduduki perolehan DAU tertinggi dan terendah dengan membandingkan antar hasil Keppres DAU dan hasil simulai dapat dipaparkan seperti tabel 3 .

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa jika indikator HDI/IPM menjadi masukan bagi perumusan model DAU, Provinsi-Provinsi Irian Jaya (Papua); Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT); Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar); Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng); serta Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng); merupakan 5 (lima) besar provinsi yang akan mendapatkan alokasi anggaran dari pos DAU yang cukup besar.

Studi ini juga menghasilkan besaran DAU per penduduk hasil simulasi; yang dari tahun 2001-2003 berturut-turut sebesar Rp 93.764,11 pada tahun 2001; menjadi Rp 111.311,03 pada tahun 2002; dan menjadi Rp 123.975,46 pada tahun 2003. Koefisien variasi untuk simulasi ini adalah sebesar 1,05.

SIMPULAN

Apa-apa yang telah dipaparkan di muka, merupakan bagian kecil dari usaha untuk memberikan masukan terhadap berbagai upaya di dalam menghasilkan rumusan/formulasi DAU di tahun-tahun mendatang yang dapat disepakai oleh banyak pihak; dengan semaksimal mungkin mempertimbangkan berbagai variabel riil di lapangan yang sering menjadi masukan dari para aparatur birokrasi di Pemerintahan Daerah.

Upaya untuk memodifikasi model DAU dengan memasukkan unsur pembentuk HDI (Human Development Index), yang dalam model ini menggunakan Indeks Lama Sekolah (ILS), Indeks Harapan Hidup (IHH), dan Indeks Melek Huruf (IMH), menghasilkan beberapa kesimpulan yang menarik; dimana untuk daerah atau provinsi yang selama ini tertinggal dalam bidang ini (baca: pendidikan, kesehatan dan ekonomi); akan mempunyai harapan mendapatkan alokasi anggaran secara meyakinkan atau cukup besar. Provinsi-provinsi ini meliputi: Provinsi Irian Jaya (Papua); Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT); Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar); Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng); serta Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng); dan sebagainya.

Sebagai catatan akhir, dengan digunakannya konsep Kesenjangan Fiskal (fiscal gap); dalam model DAU ini terdapat 5 (lima) provinsi yang tidak mendapatkan bagian anggaran dari pos DAU, yaitu: (1) Provinsi Riau; (2) Provinsi DKI Jakarta; (3) Provinsi Jawa Barat; (4) Provinsi Jawa Timur; serta (5) Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dimana konsep DAU adalah untuk pemerataan pendapatan, khususnya bagi

daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan fiskal besar, namun tidak mempunyai kemampuan pembiayaan secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP. (2001). Indonesia Human Development Report : Towards a New Consensus, Democracy and Human Development in Indonesia. Jakarta: BPS-Bappenas-UNDP.

Ditjen PKPD Depkeu RI. (2004). Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal. Jakarta: Penerbit Ditjen PKPD.

_____. Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, 2001-2003. Jakarta: Penerbit Ditjen PKPD.

Kadjatmiko. (2003). Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Makalah disampaikan dalam kegiatan One Day Seminar dan Workshop Otonomi Daerah yang diselenggarakan atas kerjasama antara LAPI ITB di Hotel Indonesia Jakarta, 10-11 Desember.

PP (Peraturan Pemerintah) RI Nomor 104 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021).

PP (Peraturan Pemerintah) RI Nomor 84 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165).

Saragih, J P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Sidik, M.dkk (Ed). (2002). Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

UU (Undang-Undang) RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).

Yani, A. (2002). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Seri Keuangan Publik. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

VISI PEREKONOMIAN INDONESIA 2030

Hampir 60 tahun Indonesia merdeka, paradigma pembangunan mengacu pada "pendekatan daratan", dan mengabaikan "pendekatan lautan". Padahal Wilayah Indonesia terdiri atas 70% lautan, sedangkan sisanya 30% daratan. Maka sudah pada galibnya, jika pada rencana pembangunan 20 tahun ke depan pembangunan Indonesia harus lebih berorientasi kepada kelautan. Oleh sebab itu, dalam buku ini diusulkan Visi Perekonomian Indonesia 2030 adalah Bangsa Maritim Sejahtera dan Merata.

Dengan asumsi bahwa pada era ini kita tengah masuk dalam pusaran globalisasi dan juga pada era desentralisasi maka disusunlah skenario perencanaan (*scenario planning*) Indonesia sampai dengan 2030 sebagai berikut:

1. Garuda Tangguh Terbang ke Angkasa:

Filosofi skenario ini menggambarkan arah kebijakan pemerintah yang aktif berpartisipasi dalam kebijakan liberalisasi perekonomian yang ditandai dengan penghapusan hambatan globalisasi ekonomi dalam tata kelola pemerintahan yang memberikan peran besar pada masyarakat melalui prinsip desentralisasi. Ini merupakan skenario revolusioner.

2. Garuda Bebas Melintas Samudera:

Filosofi skenario ini menggambarkan kebijakan pemerintah yang aktif berpartisipasi melalui kebijakan liberalisasi perekonomian melalui kebijakan penghapusan hambatan globalisasi ekonomi dengan tata kelola pemerintahan yang sentralistis. Ini merupakan skenario evolusioner.

3. Garuda Bebas Menantang Angin:

Filosofi skenario ini menggambarkan pengelolaan pemerintahan yang mandiri dengan melakukan pembatasan terhadap globalisasi ekonomi melalui penerapan konsep dan prinsip desentralisasi. Dengan skenario ini pertumbuhan ekonomi akan bergerak lebih melambat.



FE UNS

Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
E-mail : lukkim@gmail.com

ISBN 978-979-17320-0-0